



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
Dinas Kehutanan



KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

*Disampaikan Dalam Acara :
FESTIVAL GAKKUM TAHUN 2023*

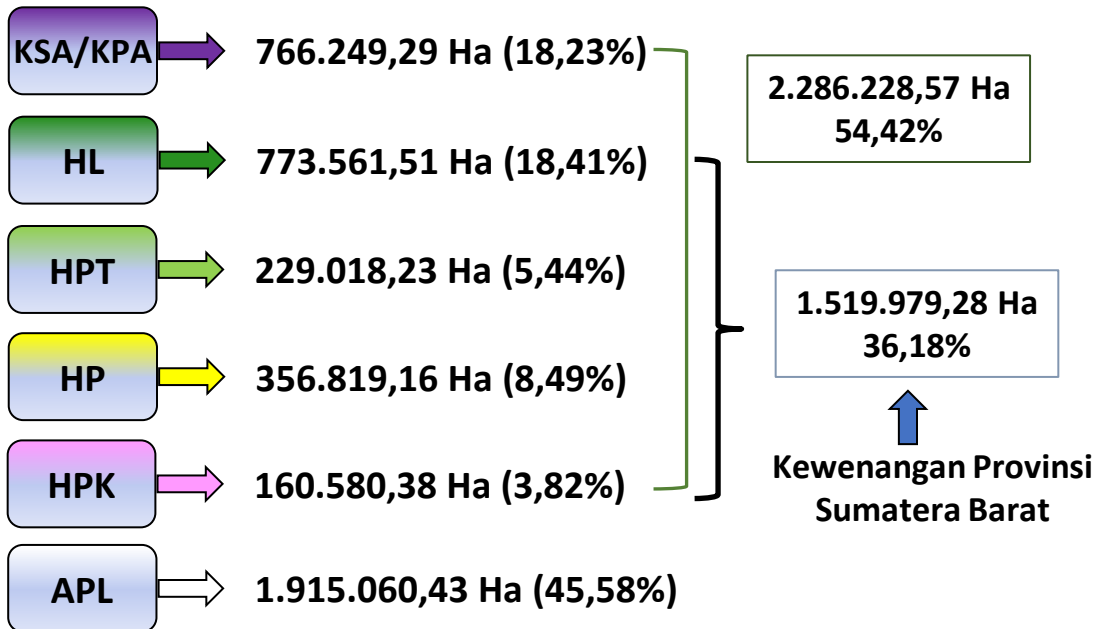
JAKARTA, DESEMBER 2023



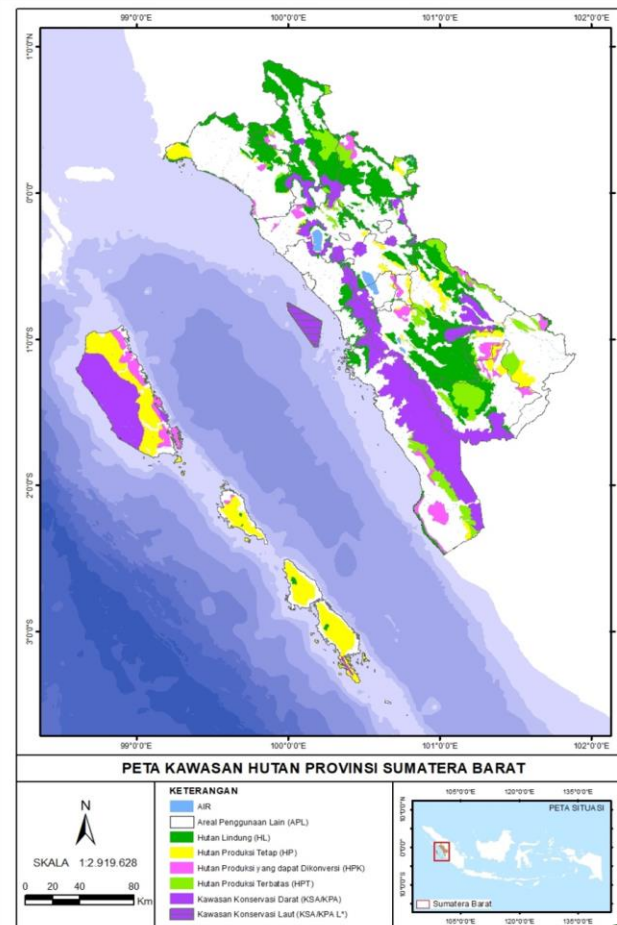
OUTLINE PAPARAN

- 1. Kondisi Hutan Sumatera Barat***
- 2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan***
- 3. Visi, Misi, Prioritas dan Tujuan Strategis RPJMD 2021-2026***
- 4. Kegiatan Pamhut***





Luas Wilayah Provinsi Sumatera Barat
berdasarkan Data BPS – Provinsi Sumbar Dalam Angka Tahun 2022:
42.012,89 Km² atau 4.201.289 Ha



NAGARI/DESA DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN

**Jumlah Desa/Nagari
1.159**

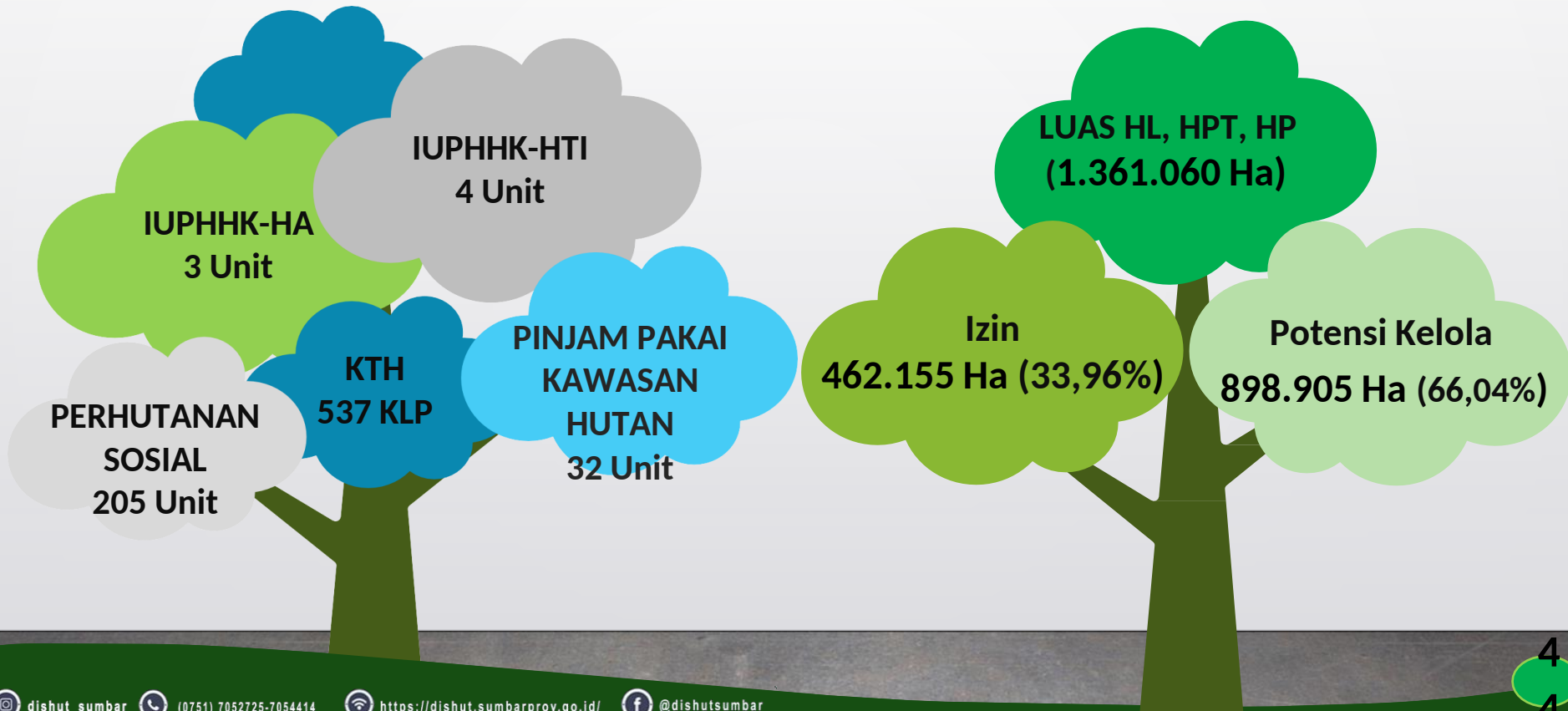
**Dalam/Sekitar Kawasan Hutan
950 Nagari (81,97%)**

**Luar Kawasan Hutan
209 Nagari (18,03%)**

Sumber: BPS (2020)



KARAKTERISTIK KAWASAN HUTAN





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, Menteri mempunyai
kewenangan menetapkan Unit Pengelolaan Hutan
Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi atas
usulan dari Gubernur;

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI SUMATERA BARAT

SK.447/2021



**KPHL = 7 UNIT
KPHP = 5 UNIT**

Rincian Luas dan Fungsi Hutan KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Barat

NO.	UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN				Luas		JENIS KPH
		HL	HPT	HP	HPK			
1	UNIT I	± 196.709	± 29.566	±	± 4.924	± 231.199		KPHL
2	UNIT II	± 74.642	± 4.583	± 18.213	± 5.543	± 102.981		KPHL
3	UNIT III	± 116.949	± 20.674	± 3.899	± 11.166	± 152.688		KPHL
4	UNIT IV	± 20.004	± 7.323	± 2.495	± 9.463	± 39.285		KPHL
5	UNIT V	± 62.695	± 398	± 14.528	± 5.570	± 83.191		KPHL
6	UNIT VI	± 78.579	± 28.118	± 22.126	± 4.468	± 133.291		KPHL
7	UNIT VII	± 142.679	± 11.058	± 3.479	± 8.139	± 165.355		KPHL
	JUMLAH KPHL	± 692.257	± 101.720	± 64.740	± 49.273	± 907.990		
8	UNIT VIII	± 57.576	± 53.387	± 14.568	± 13.242	± 138.773		KPHP
9	UNIT IX	± 10.138	± 28.248	± 22.576	± 15.784	± 76.746		KPHP
10	UNIT X	± 8.461	± 45.235	± 3.951	± 31.124	± 88.771		KPHP
11	UNIT XI	± 3.761		± 130.891	± 1.602	± 136.454		KPHP
12	UNIT XII	± 3.456		± 120.080	± 48.925	± 172.461		KPHP
	JUMLAH KPHP	± 83.392	± 126.870	± 292.066	± 110.877	± 613.205		
	JUMLAH KPHL DAN KPHP (Ha)	± 775.649	± 228.590	± 356.806	± 160.150	± 1.521.195		

Keterangan : Luas unit KPHP dan KPHL dihitung secara digital

*Catt: Sedang diusulkan perubahan Pergub tentang UPTD KPH Dishut
Sumbang (Proses persetujuan dari Kemendagri)*

No.	Unit KPH	Lokasi	Fungsi Kawasan Hutan						Luas (Ha)	Jenis KPH/Types of KPH			
			HL (Ha)		HPT (Ha)		HP (Ha)				HPK (Ha)		
1	2	3	4		5		6		6		7	8	
1	Unit I	Kab. Pasaman	±	196.709	±	29.566	±	-	±	4.924	±	231.199	KPHL
2	Unit II	Kab. Pasaman Barat	±	74.642	±	4.583	±	18.213	±	5.543	±	102.981	KPHL
2	Unit III	Kab. Lima Puluh Kota	±	116.949	±	20.674	±	3.899	±	11.166	±	152.688	KPHL
3	Unit IV	Kab. Agam	±	20.004	±	7.323	±	2.495	±	9.463	±	39.285	KPHL
4	Unit V	Kab. Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok	±	62.695	±	398	±	14.528	±	5.570	±	83.191	KPHL
5	Unit VI	Kab. Sijunjung	±	78.579	±	28.118	±	22.126	±	4.468	±	133.291	KPHL
6	Unit VII	Kab. Solok	±	142.679	±	11.058	±	3.479	±	8.139	±	165.355	KPHL
Jumlah Luas KPHL			±	692.257	±	101.720	±	64.740	±	49.273	±	907.990	
7	Unit VIII	Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya	±	57.576	±	53.387	±	14.568	±	13.242	±	138.773	KPHP
8	Unit IX	Kab. Dharmasraya	±	10.138	±	28.248	±	22.576	±	15.784	±	76.746	KPHP
9	Unit X	Kab. Pesisir Selatan	±	8.461	±	45.235	±	3.951	±	31.124	±	88.771	KPHP
10	Unit XI	Pulau Siberut, Kab. Kep. Mentawai	±	3.761		-	±	130.891	±	1.802	±	136.454	KPHP
11	Unit XII	Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara Selatan Kab. Kep. Mentawai	±	3.456		-	±	120.080	±	48.925	±	172.461	KPHP
Jumlah Luas KPHP			±	83.392	±	126.870	±	292.066	±	110.877	±	613.205	
Luas Total (Ha)			±	775.649	±	228.590	±	356.806	±	160.150	±	1.521.195	
Sumber/Source : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2022/Field of Forest Planning and Utilization 2022													
Catatan : Lokasi Unit KPH Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018													
Notes: Location of KPH based on Development Map of Forest Area Inauguration of West Sumatra Province Number SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018													

Visi, Misi, Prioritas dan Tujuan Strategis RPJMD 2021-2026



VISI



**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang
Unggul dan Berkelanjutan**

**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk
pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**

03



MISI

**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**

06



MISI

- 1. Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan**
- 2. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas**



**Tujuan
OPD**



MISI 3 Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan
IK = Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan
Target: 5%/Tahun

TUJUAN
OPD



SASARAN OPD

Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat

IK : Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)
Target: 250.000 Ha

Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan

IK : Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan (Unit)
Target: 100 Unit



MISI
6

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target: 82,50

TUJUAN
OPD



SASARAN OPD

**Meningkatkan kualitas hutan
dan lahan**

IK : Indeks Tutupan Hutan
Target: 59,26



TARGET PROGRAM UNGGULAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Keputusan Gubernur Sumbar No. 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Progul Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET						TOTAL
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit)							
	a. Jumlah Bibit (batang)	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	5.500.000
	b. Jumlah Arboretum (Unit)	-	1	2	2	2	2	9
	c. Luas Agroforestry (Ha)	500	500	500	500	500	500	3.000
	d. Jumlah Komoditi yang Dikembangkan (Jenis)	10	10	10	10	10	10	60
2	Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan yang dilakukan (kali)							
	a. Jumlah kasus tertangani (kasus)	2	2	2	2	2	2	12
	b. Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang dilakukan (kali)	100	100	100	100	100	100	600
	c. Jumlah Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan (kali)	100	100	100	100	100	100	600
3	Jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi kehutanan yang disediakan (unit)							
	a. Jumlah Alat Produktif yang disediakan (unit)	10	10	20	20	20	20	100
	b. Jumlah sarana dan prasarana Ekowisata yang disediakan (unit)	10	10	20	20	20	20	100
	c. Jumlah Stup lebah madu yang disediakan (unit)	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.400
4	Persentase peningkatan mutu dan nilai tambah produksi kehutanan (%)	-	20	20	20	20	20	
5	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)							
	a. Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan (orang)	113	500	500	500	500	500	2.613

KEGIATAN PENGAMANAN HUTAN

**POLISI
KEHUTANAN
(POLHUT)**

INTELIJEN /
PULBAKET

PATROLI
RUTIN
PAMHUT

PATROLI SIMPATIK
DAN SOSIALISASI
SERTA PENYULUHAN

OPERASI
FUNGSIONAL/GABUNGAN
PAMHUT

**PENYIDIK
PEGAWAI
NEGERI SIPIL
(PPNS)**

PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN KASUS
TIPIHUT

TINDAK LANJUT KASUS
SERTA PENANGANAN
BARANG BUKTI

MONITORING DAN
EVALUASI KASUS TINDAK
PIDANA KEHUTANAN

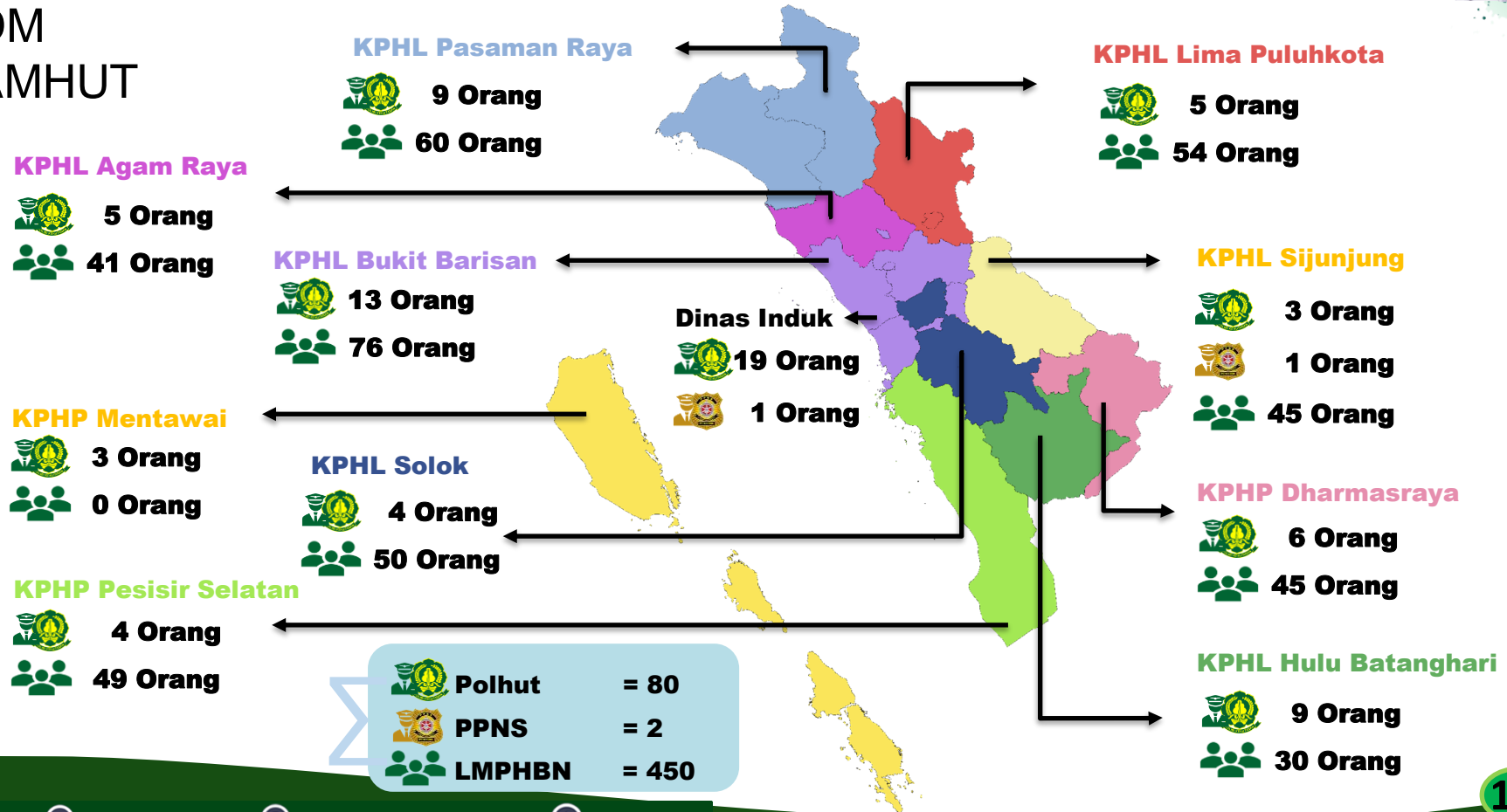
LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN
HUTAN BERBASIS NAGARI (LMPHBN) DAN
MASYARAKAT PEDULI API (MPA)

LMPHBN MELAKUKAN PATROLI
RUTIN TINGKAT TAPAK
MELAPORKAN KE KPHL/P

MPA MEMBANTU MITIGASI,
DETEKSI DINI TINGKAT TAPAK
MELAPORKAN KE KPHL/P

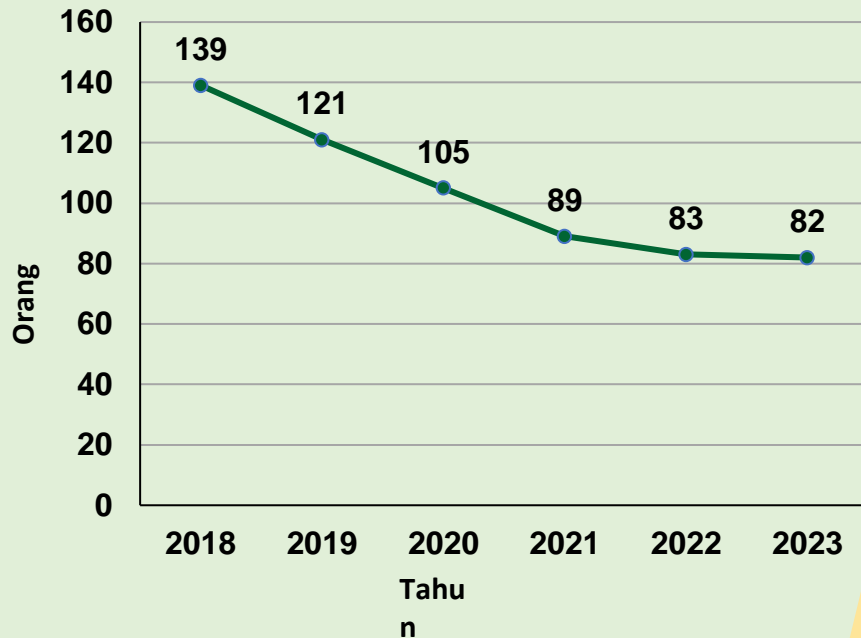


SDM PAMHUT





DATA PERSONIL POLISI KEHUTANAN 2018 - 2023

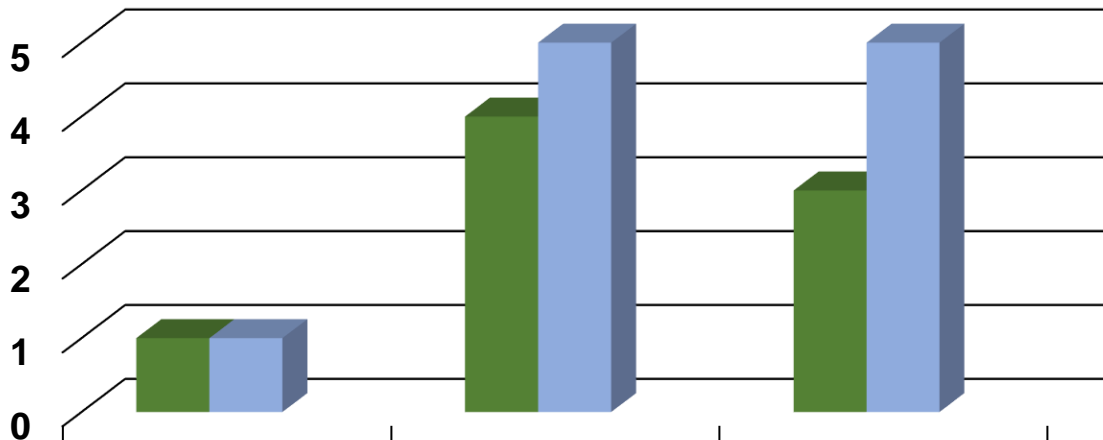


POLISI KEHUTANAN BERDASAR JE JABATAN 2023

No	Jabatan	Jumlah
1	Polisi Kehutanan Madya (IV/a dan IV/b)	9 Orang
2	Polisi Kehutanan Muda (III/c dan III/d)	12 Orang
3	Polisi Kehutanan Pertama (III/a dan III/b)	15 Orang
4	Polisi Kehutanan Penyelia (III/c dan III/d)	28 Orang
5	Polisi Kehutanan Mahir (III/a dan III/b)	7 Orang
6	Polisi Kehutanan Terampil (II/b, II/c, dan II/d)	9 Orang
7	Polisi Kehutanan Pemula (II/a)	2 Orang
	Total	82 Orang



DATA PERSONIL PPNS TAHUN 2023



	Eksisting	Kebutuhan	Kekurangan
■ Dinas Induk	1	4	3
■ KPHL/KPHP	1	12	11
Total	2	16	14

■ Dinas Induk ■ KPHL/KPHP Total



LMPHBN

SALINAN



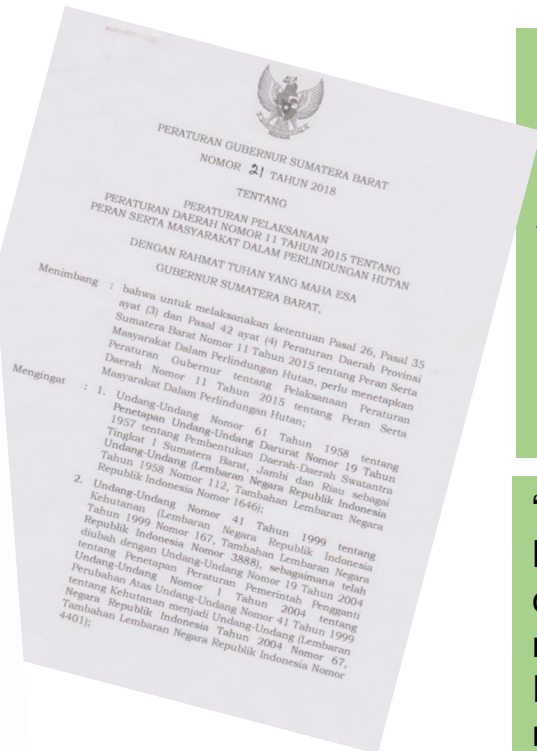
GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan kelestarian hutan dalam rangka mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan;
 - bahwa peran serta masyarakat di Sumatera Barat dalam memelihara hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat belum terlaksana secara optimal;
 - bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan, perlu adanya peraturan mengenai peran serta masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan.

“Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari yang selanjutnya disingkat dengan **LMPHBN** adalah lembaga masyarakat Nagari yang peduli dalam Perlindungan Hutan baik secara langsung maupun tidak langsung”.



PATROLI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN GABUNGAN



Kegiatan Sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan





PEMASANGAN PAPAN PENGUMUMAN ILLOG DAN KARHUTLA

Pemasangan Papan Pengumuman





PEMBERDAYAAN LMPHBN DAN MPA

Pemberdayaan
Masyarakat melalui
LMPHBN dan MPA





KEGIATAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN (1)

Kasus Tipihut Berawal
dari Laporan Lembaga
Perhutanan Sosial



Operasi Penangkapan
dan pengamanan
Tersangka dan BB di
Dalam Kawasan Hutan



KEGIATAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN (2)

TKP Tindak Pidana
Kehutanan di Kawasan
Hutan Produksi Lunang
Kab. Pesisir Selatan





PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Pemeriksaan
Pelaku/Tersangka Tindak
Pidana Kehutanan



Barang Bukti Tindak Pidana
Kehutanan Berupa Alat Berat
Berkegiatan Di dalam Kawasan
Hutan



PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Proses Penahanan
Tersangka Yang Dititipkan
di Rutan Polda Sumbar





PROSES PENANGANAN BARANG BUKTI KAYU TEMUAN HASIL PATROLI/OPERASI POLHUT

Barang Bukti Kayu Temuan
Hasil Patroli/Operasi Polisi
Kehutanan





PROSES PENANGANAN BARANG BUKTI KAYU TEMUAN PATROLI/OPERASI POLHUT

HASIL

Koordinasi dengan Ketua
Pengadilan Negeri Terkait
Penanganan BB Kayu
Temuan Kehutanan





PROSES PENANGANAN BARANG BUKTI KAYU TEMUAN HASIL PATROLI/OPERASI POLHUT

Penyerahan Kayu Temuan
Untuk Kepentingan
Publik/Sosial Sesuai
Penetapan Ketua
Pengadilan



PROSES GAKKUM KARHUTLA

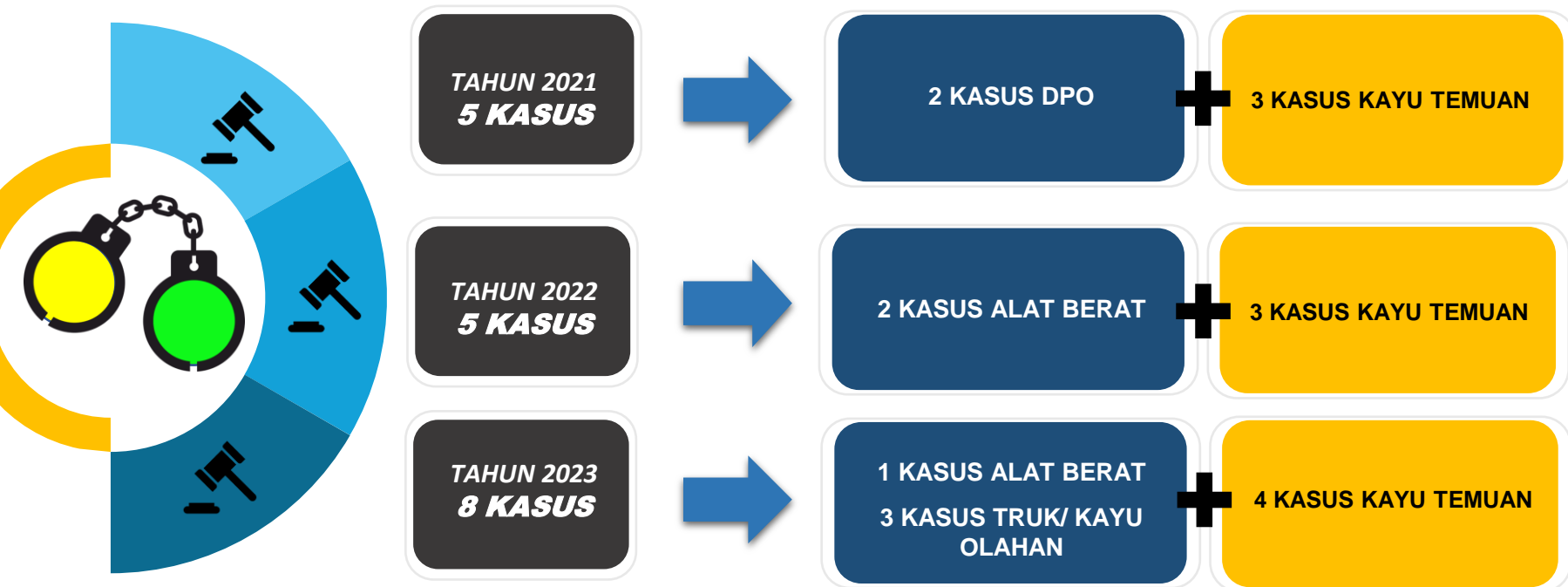
Proses Gakkum Karhutla
di SM Barisan
(tertangkap tangan)



Tersangka :

1. LM (4 tahun)
2. AY (1 tahun 6 bulan)

KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG TERTANGANI





PERUNTUKAN KAYU TEMUAN UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Kayu Temuan (M³)	Penetapan Pengadilan	Lelang/Perkiraan Harga Perdagangan (Rp)	Peruntukan
1	2021	Kabupaten Dharmasraya	Kayu Olahan 15,0400 M3	8/Pen.Pid/2022/PN/Plj Tgl. 20 Januari 2022	15,0400 x Rp 3.000.000 = Rp. 45.120.000,	- Mushalla
2		Kabupaten Pasaman	Kayu Olahan 58,0898 M3	71/Pen.Pid/2022/W.3.u5 Tgl. 4 Agustus 2022	58,0898 x Rp 3.000.000 = Rp. 174.269.000,-	- Mesjid, Gereja, Jembatan
3		Kabupaten Sijunjung	Kayu Olahan 18,4700 M3	94/Pen.Pid/2021/PN/ Mrj Tgl. 29 September 2021	18,4700 x Rp 3.000.000 = Rp. 54.410.000,-	- Mesjid Baitunnur
			Kayu Olahan 21.1100 M3	1/PPBB/2021/PN Mrj Tgl. 07 Juni 2021	21,1100 x Rp 3.000.000 = Rp. 63,330,000,	- Mushalla, Pesantren
4	2023	Kabupaten Sijunjung	Kayu Bulat 11,74 M3	56/Pen.Pid/2023/PN/Ms Tgl. 16 Mei 2023	11,75 x Rp 3.000.000 = Rp. 21.120.000,-	- Mesjid
5		Kabupaten Solok	Kayu Olahan 17,5112 M3	60/Pen.Pid/2023/PN/Kbr Tgl. 24 Maret 2023	17,5112 x Rp 3.000.000 = Rp. 52.533.600,-	- Mesjid
			Kayu Olahan 6.6560 M3	108/Pen.Pid/2023/PN/Kbr Tgl. 13 Juli 2023	6,6560 x Rp 3.000.000 = Rp. 19.980.000,	- Mesjid
6		Kabupaten Pesisir Selatan	Kayu Olahan 15,4300 M3	155/PenPid.B-SITA/2023/ PN Pnn Tagl. 28 Agus 2023	15,4300 x Rp.3.000.000 = Rp. 46.290.000	- Mesjid Baitulrahman - Mesjid Nurul Ihsan
JUMLAH (1 s/d 6)			149.0070 M³		Rp. 477.052.600	

GAKKUM PADA PERHUTANAN SOSIAL (PS)



1. Mendorong Terbentuknya Seksi Pengamanan Hutan pada Areal Perhutanan Sosial
2. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kelompok PS
3. Dukungan Penegakan Hukum (1 Kasus) Perambahan dengan Alat Berat di LPHN Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan

SARAN MASUKAN



1. Perlu dukungan Dirjen Gakkum KLHK dalam pembentukan PPNS dan Atasan PPNS
2. Peningkatan sinergitas upaya Gakkum terhadap pelaku pembakaran KH yang dilakukan oleh non korporasi
3. Dukungan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dalam Patroli dan Operasi Pengamanan Hutan pada Wilayah Kelola KPH
4. Dukungan pembiayaan dari Pusat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM Polhut/PPNS dalam upaya Gakkum

Mengantar Statistik
dengan Hati



Keluarga Besar
**DISHUT
SUMBAR**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Ir. Yozarwardi Usama Putra, S.Hut, M.Si, IPU
(Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar)



081271501266



@yozarwardi



Yozarwardi Yoz



yozarwardi.usama1234@gmail.com



TERIMA KASIH

33